

IMPLEMENTASI BELA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN NASIONALISME

Suwarno Widodo*

ABSTRAK

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai –nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Kata kunci: bela negara, nasionalisme

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah yang unik jika dibanding dengan Negara lain di belahan dunia ini. Keunikan ini antara lain meliputi sejarah pra kolonialisme Belanda (masa kejayaan Majapahit,

Sriwijaya, Samudra Pasai, Mataram Islam) masa penjajahan, masa perjuangan melawan penjajah, perjuangan menegakkan kemerdekaan, perjuangan mengisi kemerdekaan (Orla, Orba, Oref,). Masing – masing masa memiliki romantisme kehidupan/perjuangan yang berbeda karena memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda pula sesuai dengan masanya.

Pada masa pra kolonialisme ada romantika kehidupan kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara dan cukup disegani dalam pergaulan internasional. Pada masa kolonialisme

ditandai dengan pengurusan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumber daya alamnya untuk kepentingan penjajah. Pada masa perjuangan melawan penjajah tumbuh jiwa patriotisme, rela berkorban yang luar biasa untuk menghadapi penjajah. Pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan tumbuh rasa patriotisme, rela berkorban dan kebersamaan yang sangat kuat. Pada masa mengisi kemerdekaan merupakan masa membangun karakter bangsa melalui pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan perdamaian abadi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Setiap masa akan melahirkan kader bangsa yang akan memperjuangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kader bangsa tidak akan muncul tiba-tiba tetapi melalui proses kaderisasi sesuai dengan problem dan tantangannya. Pada masa sekarang dengan sendirinya akan berbeda

problem dan tantangannya jika dibanding dengan pada masa sebelumnya, sehingga proses pengkaderannya baik metode materinya juga harus berbeda.

Kader-kader bangsa inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan tetap tegak dan eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan masyarakat global. Mereka akan membela Negara dalam menghadapi problem ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam. Untuk bisa melahirkan kader tersebut harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, Badan Kesbangpolinmas-lah yang sangat pas sebagai kekuatan inti kegiatan tanpa mengabaikan badan /instansi lain untuk disinergiskan dalam pembentukan kader bangsa yang memiliki kemampuan bela Negara dan berkarakter Nasional.

B. Bela Negara

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian antara lain amanah UUD 1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara tidak pandang laki-laki / perempuan, pekerjaan maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umaro, pejabat maupun penjahat, politisi maupun polisi, sipil maupun militer. Dengan demikian bela negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas, supaya mampu mengakomodasi

semua golongan, maupun kelompok kepentingan.

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah :

1. Cinta Tanah Air dengan indikator :
 - a. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
 - b. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia
 - c. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara
 - d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
 - e. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya :

- a. Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.
 - b. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Ikut serta dalam pemilihan umum.
 - d. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara
 - e. Berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara
3. Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan indikatornya :
- a. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila.
 - b. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.
 - d. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila.
 - e. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan indikator :
- a. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.
 - b. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman
 - c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.
 - d. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.
5. Memiliki Kesiapan Fisik dan Psikis, dengan indikator :
- a. Memiliki Kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensia.
 - b. Senantiasa memelihara jiwa dan raganya
 - c. Senantiasa bersyukur dan berdo'a atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan YME.
 - d. Gemar berolah raga
 - e. Senantiasa menjaga kesehatan.

Untuk bisa melakukan bela negara harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan ketrampilan bela negara, kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Jalur pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan Kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan non formal di masyarakat, instansi, orsospol dan ormas. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan rumah tangga.

Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri. Aktifitas bela negara dari tataran yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Bela negara belum tentu bela pemerintah, dan sebaliknya bela pemerintah juga belum tentu bela negara. Kondisi yang ideal bela negara juga bela pemerintah, demikian juga bela pemerintah juga bela negara

kondisi demikian jika pemerintah dan Negara selaras dengan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Nasionalisme

Nasionalisme atau faham kebangsaan antara bangsa yang satu dengan yang lain memiliki sejarah yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia memiliki sejarah yang unik, bangsa dapat diartikan suatu kesatuan solidaritas masyarakat yang terbangun oleh perasaan kebersamaan akibat kesediaan saling berkorban dalam waktu yang panjang serta kesediaan untuk melanjutkan di masa kini dan masa yang akan datang dengan berlandaskan atas kebersamaan itu

untuk mewujudkan cita-cita bersama. (Matori Abdul Jalil, 2001). Solidaritas dan kebersamaan tersebut tidak terbangun atas asal-usul, suku bangsa, agama, bahasa, geografi melainkan pengalaman sejarah dan nasib bersama.

Bagi bangsa Indonesia pembentukannya melalui proses yang panjang, adanya perasaan senasib, sepejuangan, akan dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang pada akhirnya mampu menumbuhkan kebersamaan untuk menghadapi musuh yang sama. Pada menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia semangat kebangsaannya sangat tinggi, kerelaan berkorbannya juga tinggi tetapi akhirnya ini ada semacam penurunan semangat kebangsaan / nasionalisme, mengapa bisa demikian ?

Proses pembangunan Indonesia yang masa Orde Baru sangat sentralisasi mengakibatkan munculnya kesenjangan pada berbagai sektor ekonomi, politik, sosial budaya maupun pada pembangunan wilayah/kawasan barat, tengah dan timur. Kesenjangan inilah antara lain yang memicu mudarnya rasa solidaritas, kebersamaan karena nasibnya dalam kenyataannya tidak sama, kelompok yang satu melakukan pengorbanan di pihak lain menikmati pengorbanan yang lain. Sehingga memunculkan rasa ketidakadilan antar komponen bangsa yang semula terbentuk.

Upaya untuk menanggulangi tersebut harus bisa menumbuhkan kepercayaan pada komponen bangsa bahwa pembangunan ke depan dijamin tidak akan menimbulkan kesenjangan

baik antar sektor maupun antar wilayah, tidak mudah memang tetapi harus dimulai. Melalui kepemimpinan yang bisa dipercaya membangun visi dan misi yang sama, yang dijabarkan dalam program yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Visi pembangunan Nasional tahun 2005-2025 Indonesia Yang mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

Visi 2010-2014 : Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mandiri: Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar

dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur: Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan

hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Delapan Misi Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian; pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem

produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah

memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.

4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun

kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan *esensial* minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah

meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki

pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Visi 2010-2014 : Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang

berlandaskan pada keunggulan daya saing,

kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Misi RPJMN 2010 – 2014 :

1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia sejahtera
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi
3. Memperkuat dimensi keadilan disenua bidang

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses

pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejala yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005-2008 dengan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraannya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan di dalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Krisis

keuangan global yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, terjadinya gejolak harga pangan dan energi di seluruh dunia, serta makin pentingnya isu perubahan iklim global dalam beberapa tahun ini, akan mengakibatkan tuntutan dan

reaksi akan perubahan dasar dalam tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi global yang baru harus mengedepankan aspek kemakmuran masyarakat dunia secara bersama, merata, adil dan berkelanjutan. Untuk itu, model pembangunan ekonomi yang tidak memberikan ruang dan peran yang penting serta proporsional bagi munculnya negara-negara berkembang tidak dapat terus dipertahankan.

Koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas, tanpa disertai regulasi dan pengawasan yang cukup, untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas, harus dilakukan. Pasar harus dilindungi dari tindakan dan keputusan pelaku pasar yang sembrono dan tamak yang hanya memperhitungkan keuntungan bisnis pribadi dalam jangka pendek, dengan mengesampingkan azas kehati-hatian, kepatutan, dan keberlanjutan. Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mengantisipasi dan harus tercermin dalam penetapan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia, serta dalam langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal ini untuk menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita-cita kemandirian dan kemajuan dalam kemakmuran rakyatnya.

Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis

ekonomi dan transisi demokrasi yang sangat rumit dalam satu dasawarsa ini, serta kesiapan yang terus ditingkatkan dalam mengelola dampak krisis keuangan global, akan menjamin terpeliharanya momentum perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini juga menandai bangkitnya Indonesia kembali dalam kancah internasional serta memperoleh respek dunia karena kebangkitan Indonesia tersebut dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal yang mulia, yaitu azas tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penghormatan kepada Hak Azasi Manusia, pluralisme, demokrasi, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, serta berpartisipasi dalam tanggung jawab memelihara keseimbangan lingkungan alam dan keamanan dunia. Di dalam negeri, tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Lapangan kerja yang tercipta harus mampu memberikan nilai tambah yang tinggi, baik secara ekonomis maupun harkat hidup manusia (*decent jobs*). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Pembangunan ekonomi yang terkonsentrasi di perkotaan, dan mengakibatkan tingginya urbanisasi dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan serta menyebabkan

kesenjangan kesejahteraan antara perdesaan-perkotaan, memerlukan perhatian tidak saja diberikan kepada perkotaan, namun juga perlu diberikan kepada perdesaan dengan menciptakan daya tarik wilayah perdesaan serta keterkaitan pembangunan ekonomi antara desa-kota. Pembangunan perkotaan yang difokuskan kepada sarana prasarana pelayanan publik perkotaan, harus memperhatikan pembangunan potensi sosial budaya heterogen, khususnya di kota-kota metropolitan dan kota besar. Dalam hal keterkaitan desa-kota yang dibutuhkan dalam mengurangi kesenjangan kesejahteraan, maka pembangunan perkotaan harus memperhatikan pembangunan kota-kota menengah dan kota-kota kecil di sekitarnya.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititik-beratkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh

konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota oleh rakyat telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan harus terus diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka

bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, harus terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang

dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan serta sikap kritis berbagai pihak terhadap pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus samasama dijunjung tinggi sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan

masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah. Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara

langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keberintisan. Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan

kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diberikan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali serta untuk mengendalikan arus migrasi langsung dari desa ke kotakota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, harus dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal. Dalam kaitan itu, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yang

telah berjalan selama ini harus terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai penggerak pembangunan wilayahwilayah di sekitarnya dan melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, dengan memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota

masing-masing. Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling melengkapi dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergalai potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan

perundang-undangan, pendanaan, serta penerapan sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus dilanjutkan. Demikian pula peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak dilanjutkan. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun pada periode 2004-2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, harus terus kita perluas di seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Untuk itu, harus terus diperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

Jika pelaksanaan visi-misi dilandasi semangat bela Negara saya optimis nasionalisme Indonesia akan pulih kembali, karena pada hakekatnya antara nasionalisme dan bela Negara sesuatu yang tidak bisa dipisahkan walaupun bisa dibedakan. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan bela Negara merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda bagi bangsa yang ingin eksis dalam kancah

globalisasi. Potensi dan sumber daya yang

ada harus bisa dimanfaatkan untuk menumbuh kembangkan nasionalisme, dalam era otonomi daerah perlu penggalian potensi kearifan local, nasionalisme bukan sesuatu yang otomatis tetapi harus direncanakan, diprogramkan secara kongkrit sistematis dan berkelanjutan. Bangsa-bangsa yang kurang perhatian pada pengembangan nasionalisme akan gulung tikar dari pergaulan global.

D. Globalisasi dan Nasionalisme

Menjelang abad 21 dunia mengalami krisis multi dimensi, mulai dari dimensi ideologi dengan ditandai berakhirnya perang dingin, politik untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala efek kebebasannya, krisis ekonomi yang melanda negara-negara maju maupun berkembang, krisis budaya yang melanda bangsa-bangsa yang belum mapan budayanya, hankam yang ditandai dengan kekuatan yang memusat pada satu negara. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menyambut abad Glabalisasi, yang ditandai dengan meluasnya pengaruh internasional seolah-olah dunia ini tanpa batas, perkembangan teknologi tranportasi dan komunikasi menyebabkan mobilitas manusia, sumber daya alam, dan modal semakin tinggi, dan pasar bebas dunia yang sarat dengan persaingan bebas.

Perubahan yang begitu cepat dalam menyongsong globalisasi bisa menyurutkan rasa nasionalisme apabila suatu bangsa tidak mampu

memenuhi kebutuhan warganya. Interaksi antar manusia yang sangat meluas ini kadang – kadang menyebabkan peran negara menjadi dianggap semakin rendah, apalagi jika negara kurang memberikan perlindungan hak-hak warga negaranya. Jika yang terjadi demikian tidak menutup kemungkinan akan mempercepat rasa nasionalisme.

Kasus perekrutan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia untuk dijadikan relawan penjaga perbatasan salah satu contoh kongkrit, melunturnya rasa nasionalisme, karena Negara tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan warganya. Contoh lainnya *LSM/NGO* yang kadang-kadang hanya mengharapkan imbalan finansial rela memberikan informasi yang seharusnya tidak boleh disebarluaskan karena menyangkut data/informasi strategis.

Di sisi lain globalisasi juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme, dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengetahui kondisi negara-negara lain seseorang bisa meningkat rasa nasionalisme terbukti para TKI banyak yang kembali dan menyumbangkan devisa untuk membangun tanah kelahirannya. Mereka pada umumnya merantau hanya karena keterpaksaan karena pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan.

Jadi Globalisasi pada satu sisi bisa meningkatkan nasionalisme dan

pada sisi lain bisa juga menyurutkan rasa nasionalisme. Pada kondisi pemerintah tidak mampu memberikan jaminan hak-hak warganya maka akan

bisa menyurutkan rasa nasionalisme di sisi lain pemerintah bisa memberikan jaminan hak-hak warganya bisa meningkatkan rasa nasionalisme.

Kesimpulan

1. Implementasi bela negara terus diaktualisasikan untuk menumbuhkan Nasionalisme
2. Nasionalisme terus ditumbuhkembangkan sesuai dengan eranya /global.
3. Semua komponen bangsa perlu sinergis dalam menumbuhkan nasionalisme dengan memberdayakan potensi/kearifan lokal

Daftar Pustaka

- Darmawan dan Bambang PM, 2003. *Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi*. Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- Departemen Pertahanan RI, 2006. *Tataran Dasar Bela Negara*.
- Latif Y, 2009. *Menyemai Karakter Bangsa*. Kompas. Jakarta.

Suparmo E, 2009. *Strategi Ketenagakerjaan Nasional*. Kompas. Jakarta

Sutrisno T, 2006. *Reformasi dan Globalisasi*, Yayasan Taman Pustaka, Tangerang.

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 5 2010 tentang RPJMN 2009-2014.

*)Suwarno Widodo, dosen FPIPS IKIP PGRI Semarang, Ketua LPM IKIP PGRI Semarang